

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Tekanan Eksternal

Menurut Gibson et al (2012) tekanan merupakan dorongan yang dapat bersifat mendukung atau pun menolak pelaksanaan sebuah tanggung jawab atau pun kebijakan dalam sebuah organisasi. Tekanan terdiri atas tekanan internal (*internal pressure*) dan eksternal (*eksternal pressure*). Tekanan eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tekanan ini berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha, 2012).

Sari Rahayu (2012) mengatakan, Munculnya tekanan dari berbagai pihak yang berasal dari luar organisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah disebabkan oleh:

- a) penyimpangan dan ketidakjelasan pengelolaan struktur keuangan, yang berimplikasi terhadap kerugian bagi masyarakat.
- b) Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah terkait pengelolaan dana dari pemerintah pusat, seperti dana bantuan gempa, dana rehabilitasi pasar raya, atau pun dana bantuan umum langsung
- c) Peka dan jeli masyarakat dalam mendapatkan informasi, tidak adanya perubahan terhadap berbagai infrastruktur pasar raya, hingga banyaknya masalah dalam pemberian dana bantuan langsung tentu sangat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Menurut Blenkinsop (2011) Tekanan Eksternal adalah,

Tekanan eksternal membuat seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan operasional dengan semestinya, proses tersebut dilakukan dengan lebih terbuka seperti menggunakan tenaga auditor eksternal yang bersifat independen, ketika proses tersebut berhasil dilaksanakan tentu proses transparansi pelaporan keuangan mengalami peningkatan.

2. Ketidakpastian Lingkungan

Lingkungan yang sering berubah-ubah, menuntut organisasi untuk bergerak cepat dalam menjalankan strategi dan misinya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya lingkungan yang sangat sering berubah, ketidakpastian lingkungan ini dapat mempengaruhi beberapa hal penting yang mungkin sudah diatur organisasi sebelumnya. Perubahan lingkungan tentu dapat menciptakan dua kemungkinan, pertama mendorong terjadinya percepatan proses transparansi, atau pun perubahan yang bersifat mendorong melambatnya proses transparansi.

Menurut Sudibyo (2010) permasalahan umum didalam proses transparansi dilingkungan pemerintah pusat di Indonesia berkaitan dengan sering terjadinya perubahan kultur politik dan pemerintahan. Segala prosedur yang telah disiapkan rezim terdahulu untuk menciptakan transparansi sering kali tidak berdaya dalam menghadapi berbagai perubahan didalam struktur politik dan pemerintahan. Faktor yang paling mendasar terjadi ketika terjadi perubahan struktur pemerintahan dari rezim orde baru kemas reformasi.

Keterbukaan didalam berdemokrasi hingga aspek yang lain dilakukan secara gamblang, akan tetapi tidak dilakukan secara dewasa. Hal tersebut terlihat dari berbagai demo yang anarkis dan berbagai tindakan kekerasan di sejumlah daerah untuk menuntut keadilan dalam berbagai bidang.

Menurut Miliken dan Ridha (2012) ketidakpastian lingkungan adalah rasa ketidakmampuan seseorang atau organisasi untuk memprediksi sesuatu secara akurat dari seluruh faktor sosial dan fisik yang secara langsung mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan-keputusan orang-orang dalam organisasi.

Perencanaan akan menjadi masalah dalam ketidakpastian karena peristiwa-peristiwa yang akan datang tidak dapat diprediksi. Pengendalian terhadap aktivitas perusahaan juga sulit dilakukan dalam susunan yang tidak pasti. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi diidentifikasi sebagai faktor penting karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan menjadi bermasalah dalam situasi operasi yang tidak pasti karena tidak terprediksinya kejadian masa mendatang. Dalam ketidakpastian lingkungan individu akan mengalami keterbatasan sehingga tidak dapat mengetahui kegagalan atau keberhasilan terhadap keputusan yang dibuat. Semakin tinggi kemampuan dalam memprediksinya, maka berarti semakin rendah tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi. Ini berarti bahwa semakin tinggi ketidakpastian lingkungan akan semakin menurunkan penerapan transparansi pelaporan keuangan (Daft, 2009).

Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan. Ketidakpastian merupakan persepsi dari anggota organisasi. Seseorang mengalami ketidakpastian karena dia merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara akurat. Bagi suatu organisasi, sumber utama ketidakpastian berasal dari lingkungan (Arsyadi, 2012).

Ketidakpastian lingkungan diidentifikasi sebagai faktor penting karena kondisi demikian dapat meyulitkan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan menjadi bermasalah dalam situasi operasi yang tidak pasti karena tidak terprediksinya kejadian masa mendatang. Didalam pemerintahan, ketidakpastian lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa hal diluar organisasi, seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan sebagainya.

3. Komitmen Organisasi

Didalam sebuah organisasi, komitmen dianggap hal yang penting. Hal ini dikarenakan segala kebijakan yang akan diambil oleh organisasi tergantung pada bagaimana komitmen organisasi tersebut. Jika organisasi membuat komitmen dan melaksanakannya dengan baik, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap perusahaan, dan sebaliknya jika organisasi tidak mampu menjalankan komitmennya dengan baik, maka akan berdampak negatif bagi organisasi.

Robbins dan Timothy (2008) mendefenisikan,

Komitmen menunjukkan ungkapan janji yang akan dilaksanakan didalam sebuah organisasi, komitmen tentu akan terwujud ketika masing masing pihak didalam organisasi menjalankan perannya dengan baik.

Robbins dan Judge (2007) dalam Kurniawan (2011) mendefinisikan,

Komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan organisasinya. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa komitmen organisasi mengandung unsur loyalitas terhadap organisasi dan keterlibatan dalam kinerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Allen dan Meyer dalam Norman (2010) mendefinisikan,

Komitmen organisasi sebagai suatu kelekatan afeksi atau emosi terhadap organisasi seperti individu melakukan identifikasi yang kuat, memilih keterlibatan tinggi dan senang menjadi bagian dari organisasi.

Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mempersoalkan komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung jawab. Dengan demikian, ukuran komitmen seorang pimpinan yang dalam hal ini adalah pimpinan SKPD adalah terkait dengan pendeglasian wewenang (*empowerment*). Dalam konsep ini pimpinan dihadapkan pada komitmen untuk mempercayakan tugas dan tanggung jawab ke bawahan. Sebaliknya, bawahan perlu memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri (Ridha dan Basuki, 2012).

Sopiah (2008) menyatakan ada tiga aspek komitmen antara lain:

- a. *Affective Commitment*, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena keinginan sendiri. Kunci dari komitmen ini adalah *want to*.
- b. *Continuance Commitment*, adalah suatu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan *need to*.
- c. *Normative Commitment*, adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi *ought to*.

Dari ketiga jenis komitmen tersebut, komitmen afektif adalah jenis yang paling diinginkan. Karyawan yang memiliki loyalitas, yaitu karyawan yang mempunyai komitmen afektif akan cenderung tetap bertahan. Mereka akan merekomendasikan kepada orang lain bahwa tempat kerjanya merupakan tempat yang bagus. Mereka akan sukarela melakukan pekerjaan tambahan dan memberikan saran-saran bagi perbaikan serta kemajuan organisasi.

Menurut Lubis (2011:56), mengingat pentingnya komitmen tersebut, banyak perusahaan berusaha menciptakan kondisi perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan loyalitas karyawan dengan cara-cara berikut:

1. Memberikan kompensasi (upah, gaji, dan tunjangan) yang menarik atau bahkan kompetitif bila dibandingkan dengan perusahaan lain.
2. Membuat kondisi kerja yang nyaman dan menyediakan fasilitas kerja yang baik.
3. Memberikan tugas atau pekerjaan yang menantang dan menarik.
4. Mempraktikkan manajemen terbuka (open management) dan manajemen partisipatif.
5. Memperhatikan persoalan yang dianggap penting oleh karyawan dan menjaga keadilan perlakuan terhadap karyawan perusahaan.

4. Transparansi Pelaporan Keuangan

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (PP No. 24 Tahun 2005). Transparansi pada hakekatnya dapat memberikandampak yang positif pada organisasi secara khusus dan daerah secara umum. Kebanyakan perda transparansi yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakkannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan (Ridha dan Basuki, 2012).

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kreitner dan Kinicki (2005) mendefinisikan,

transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Menurut Ridha dan Basuki (2012) penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

- a) Informasi mengenai keberhasilan pencapaian SKPD.
- b) Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu.
- c) Menyediakan akses pada pemangku kepentingan.
- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

Menurut Krina (2003) bentuk transparansi yaitu:

- a. Penyediaan informasi yang jelas
Pemerintah harus terbuka mungkin mengenai keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka harus mempunyai alasan untuk setiap keputusan dan informasi rahasia jika masyarakat menginginkannya. Cara untuk mengetahui rahasia penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung jawab yaitu adanya situs internet yang menyediakan informasi tentang laporan keuangan daerah, di dalam koran lokal tersedia informasi tentang laporan keuangan daerah dan ada laporan tahunan yang menyediakan informasi tentang laporan keuangan daerah.
- b. Kemudahan akses informasi
Akses padainformasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia. Cara untuk

mengetahui kemudahan akses informasi yaitu adanya acuan pelayanan, adanya perawatan data, adanya laporan kegiatan publik dan prosedur keluhan.

c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan

Cara untuk mengetahui menyusun suatu mekanisme pengaduan yaitu adanya kotak saran untuk membantu sistem pengelolaan keuangan daerah, adanya respon dari Bawasda terhadap pengaduan pelanggaran peraturan atau permintaan pembayaran uang suap dalam pengelolaan keuangan daerah.

d. Meningkatkan arus informasi

Cara meningkatkan arus informasi yaitu melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Cara untuk mengetahui meningkatkan arus informasi yaitu adanya fasilitas yang menampung pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah, adanya kerjasama pemerintah dengan media massa dalam menyebarkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah, mengadakan pertemuan masyarakat untuk memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang tercapai dalam pelaksanaan kegiatan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi (Deddi Nordiawan, 2006 : 34).

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Deddi Nordiawan, 2006 : 35) :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan menandai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aktiva, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. (Deddi Nordiawan, 2006 : 36).

Transparansi merupakan kemudahan untuk publik dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan tergantung pada akses publik terhadap pelaporan keuangan tersebut (Mulyana, 2006). Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Masyarakat mempunyai hak untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan dilakukan

(Ridha, 2012). Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan pihak eksternal.

5. Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan SKPD

Tekanan eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tekanan ini berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha, 2012). Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah tersebut masih sulit untuk di terapkan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana.

Hasil penelitian Blenkinsop (2011) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi didalam pelaporan keuangan sebuah organisasi, tekanan eksternal membuat seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan operasional dengan semestinya, proses tersebut dilakukan dengan lebih terbuka seperti menggunakan tenaga auditor eksternal yang bersifat independen, ketika proses tersebut berhasil dilaksanakan tentu proses transparansi pelaporan keuangan menjadi mengalami peningkatan.

6. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan SKPD

Ketidakpastian mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Govindarajan, 1984). Perubahan organisasi baik proses maupun

struktur yang ada pada organisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi keperaturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil (Mizruchi dan Fein, 1999).

Hasil penelitian Stewart dan Jensen (2009) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian menciptakan tekanan yang mendorong proses transparansi tetap dilaksanakan. Ketakutan terhadap ketidakpastian mendorong transparansi mulai dilaksanakan.

7. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan SKPD

Komitmen merupakan suatu kesepakatan diri terhadap organisasi, yang menunjukkan usaha nyata yang dilakukan oleh pihak yang terlibat di dalam manajemen untuk mencapai sasaran yang ditargetkan perusahaan, salah satunya komitmen yang dijanjikan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelaporan keuangan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Upaya untuk mempertahankan komitmen dalam menciptakan transparansi pelaporan keuangan dalam kenyataannya sangat sulit dan merupakan tantangan terberat

dalam menjalankan roda pemerintahan yang sehat, agar citra pemerintah daerah meningkat ditengah masyarakat (Halmawati dan Farah, 2015).

Hasil penelitian Ridha dan Basuki (2012) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi. Semakin kuat implementasi dari komitmen organisasi dalam melaksanakan aturan dan prosedur organisasi tentu akan mendorong meningkatnya transparansi. Salah satu bentuk komitmen yang dijalankan organisasi adalah mempublikasikan laporan keuangan perusahaan melalui media masa sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

8. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan SKPD

Tekanan eksternal merupakan salah satu factor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tekanan ini berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha, 2012). Ketidakpastian menciptakan tekanan yang mendorong proses transparansi tetap dilaksanakan. Ketakutan terhadap ketidakpastian mendorong transparansi mulai dilaksanakan (Stewart dan Jensen, 2009). Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Hasil penelitian Nela Marcelina Solin (2014) menemukan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi

laporan keuangan. Hal ini disebabkan karna tekanan eksternal yang terbentuk dari luar seperti adanya peraturan pemerintah, tekanan masyarakat atau pun dorongan dari pihak tertentu mempercepat proses transparansi untuk dilaksanakan dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian, ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pergantian elit politik yang mendorong perubahan secara drastis, keadaan tersebut memaksa segala sesuatu yang telah diprogramkan oleh rezim sebelumnya menjadi tidak terlaksana dan komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh, semakin kuat implementasi dari komitmen management dalam melaksanakan aturan dan prosedur organisasi tentu akan mendorong meningkatnya transparansi.

9. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti Terdahulu	Variabel	Perbedaan	Keterangan
1.	Budi Mulyana (2006)	Penyajian Neraca Daerah (X_1) Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) Transparansi dan Akuntabilitas	Penyajian Neraca Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan,	Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh

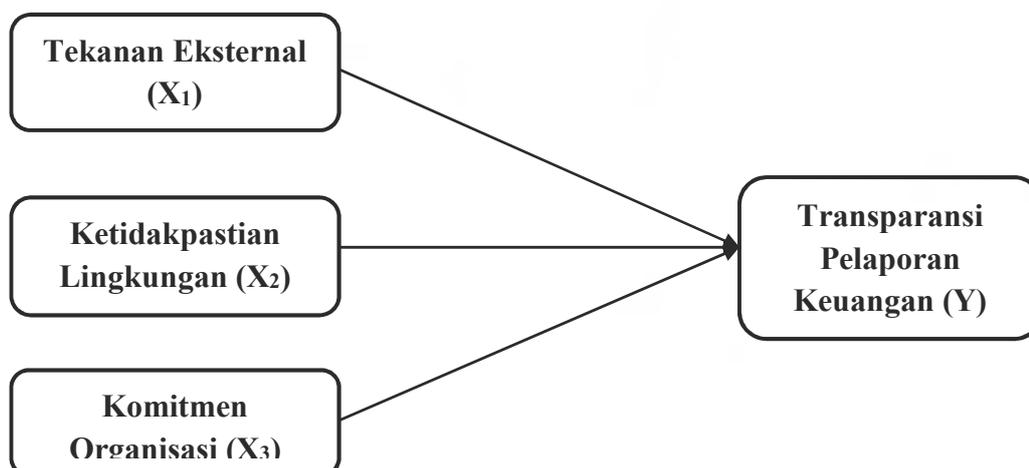
		Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	secara positif terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	David Hess (2007)	Social Reporting (X ₁) New Governance Regulation (X ₂) The Propects of Achieving Corporate Accountability Thourgh Transparency (Y)	Social Reporting, New Governance Regulation, The Propects of Achieving Corporate Accountabilit y Through Transparency	Pelaporan Sosial dan Peraturan Pemerintahan Baru berpengaruh terhadap prospek mencapai perusahaan Akuntabilitas melalui Transparansi
3.	Saufi Iqbal Nasution (2009)	Penyajian Neraca SKPD (X ₁) Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD (X ₂) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan	Penyajian Neraca SKPD, Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD	Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
4.	Aliyah dan Nahar (2011)	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X ₁) Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X ₂) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Peneliti Terdahulu	Variabel	Perbedaan	Keterangan
5.	Shukemi (2011)	Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (X) Transparansi Keuangan Daerah (Y)	Tingkat Pengungkapan Keuangan Daerah	Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap Transparansi Keuangan Daerah
6.	Ridha (2012)	Tekanan eksternal (X ₁) ketidakpastian Lingkungan (X ₂) Komitmen Manajemen (X ₃) Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)	Ketidakpastian Lingkungan	Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen berpengaruh positif terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan

10. Model Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan teori diatas, maka model penelitian dalam penelitian ini dapat diilustrasikan seperti gambar dibawah ini:

Gambar II.1
Model Penelitian



B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Diduga terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kota Pekanbaru.
- H₂: Diduga terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kota Pekanbaru.
- H₃: Diduga terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kota Pekanbaru.
- H₄: Diduga terdapat pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kota Pekanbaru.